

PERAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE* DI INDONESIA

INTISARI

Hasyid Adi Nugroho¹ Sigid Riyanto²

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online*. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Berdasarkan sifat penelitiannya, penulisan hukum ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara kepada 3 (tiga) orang responden. Adapun data sekunder diperoleh dengan cara membaca dan memahami dokumen-dokumen resmi, buku, hasil penelitian dan dokumen lainnya yang terkait dengan topik permasalahan yang diteliti. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik dua kesimpulan. *Pertama*, upaya yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melakukan penanggulangan tindak pidana perjudian *online* dilakukan melalui upaya non penal dan menggunakan upaya penal. *Kedua*, Hambatan yang ditemui dalam penanggulangan tindak pidana perjudian *online* yaitu situs perjudian *online* diproduksi ulang dengan penamaan domain yang mirip atau menggunakan *IP Address* yang berbeda, penawaran judi melalui pesan personal sehingga tidak dapat diawasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan penegakan hukum terkait kegiatan perjudian diatur secara berbeda di tiap negara sehingga hal ini menimbulkan isu yurisdiksi penindakan hukum penyelenggara perjudian *online* yang berada di luar Indonesia.

Kata Kunci: Kementerian Komunikasi dan Informatika, Penanggulangan Tindak Pidana, Perjudian *Online*.

¹ Mahasiswa Departemen Hukum Pidana, Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Angkatan 2019, Sewon, Bantul, Yogyakarta

² Dosen di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio Yustisia No. 1 Bulaksumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

THE ROLE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATION AND INFORMATIC IN OVERCOMING *ONLINE GAMBLING CRIMES* IN INDONESIA

ABSTRACT

Hasyid Adi Nugroho¹ Sigid Riyanto²

This research aims to know and analyze the efforts of the Ministry of Communication and Informatics in tackling *online* gambling crimes. This study also aims to identify and analyze the obstacles faced by the Ministry of Communication and Informatics in tackling *online* gambling crimes.

The research method used in this research is empirical legal research. Based on the nature of the research, this legal writing is descriptive research. Sources of data used in this research come from primary data and secondary data. Primary data was obtained by conducting interviews with 3 (three) respondents. The secondary data is obtained by reading and understanding official documents, books, research results and other documents related to the topic of the problem under study. Analysis of the data used in this study using qualitative analysis methods.

Based on the results of research and discussion two conclusions can be drawn. *First*, efforts made by the Ministry of Communication and Informatics in tackling *online* gambling crimes done through non-penal efforts and use penal efforts. *Second*, Obstacles encountered in tackling criminal acts of *online* gambling namely gambling sites *online* reproduced with a similar domain name or use *IP Address*. There are different regulations, gambling offers through personal messages so that they cannot be supervised by the Ministry of Communication and Informatics, and law enforcement related to gambling activities are regulated differently in each country so that this raises the issue of jurisdiction over law enforcement gambling organizers *online* who are outside Indonesia.

Keywords: Ministry of Communication and Informatics, Crime Prevention, *Online Gambling*

¹ Undergraduate Law Student of Criminal Law, Degree Program, Faculty of Law Gadjah Mada University, Sewon, Bantul, Yogyakarta

² Lecturer of Criminal Law, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Jl. Sosio Yustisia No. 1 Bulaksumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.